

Lembar Posisi

International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG)

TENTANG IPMG

International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG) adalah organisasi nirlaba yang berdiri pada Agustus 2002, dan beranggotakan 24 perusahaan farmasi berbasis riset di Indonesia. Hingga saat ini, anggota-anggota IPMG telah memperkenalkan lebih dari 250 produk baru di Indonesia untuk menangani kanker, penyakit menular, penyakit kronis (kardiovaskular, diabetes dll) dan berbagai penyakit lainnya, serta telah mempekerjakan lebih 10.000 orang.

Selama bertahun-tahun, perusahaan-perusahaan farmasi terus-menerus menghasilkan obat-obatan baru untuk mengendalikan dan mengobati penyakit dan mengurangi penderitaan pasien. Akan tetapi, penyakit-penyakit baru juga terus-menerus teridentifikasi, dan anggota-anggota IPMG berkomitmen untuk menemukan obat-obatan baru untuk mengobati penyakit-penyakit tersebut. Saat ini, pasar obat-obatan di Indonesia mencapai nilai Rp. 55 Triliun (*IMS 2Q13*), dimana pasar industri farmasi generik menguasai 75%, dan obat inovatif multinasional 25%.

Di masa mendatang, IPMG melihat kebutuhan yang semakin meningkat terhadap produk obat-obatan. Sebelumnya, Indonesia menunjukkan tingkat konsumsi obat terendah di Asia, yakni menghabiskan hanya US\$20 per orang pada tahun 2010, dibandingkan dengan US\$50 di Filipina dan sekitar US\$100 di Vietnam. Akan tetapi, angka ini meningkat dengan cepat. Seiring dengan pendapatan per kapita yang meningkat, masyarakat Indonesia menghabiskan lebih banyak uang untuk perawatan kesehatan. Pada tahun 2015 mendatang, sebagian besar masyarakat Indonesia diperkirakan akan menghabiskan lebih dari US\$140 per tahun untuk kebutuhan perawatan kesehatan.

Sebagai rekan dalam mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Indonesia dan menyediakan akses obat-obatan inovatif berstandar internasional, aman dan berkualitas tinggi bagi masyarakat Indonesia, IPMG bekerja dengan komunitas kesehatan dengan perilaku ilmiah dan mematuhi semua hukum dan peraturan terkait. Anggota-anggota kami adalah perusahaan multinasional, yang merupakan warga negara korporat yang berkomitmen untuk berpartisipasi secara aktif dalam mendukung program-program kesehatan komunitas dan pendidikan publik mengenai penyakit dan promosi perawatan kesehatan di seluruh Indonesia.

IPMG juga adalah anggota aktif dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan *International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations (IFPMA)* yang berbasis di Jenewa.

IPMG mempertimbangkan beberapa isu berikut ini yang diharapkan dapat menjadi prioritas bagi pemerintahan yang baru dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan di Indonesia:

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)

- Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan harapan terbesar bagi bangsa Indonesia yang memberikan akses bagi masyarakat Indonesia terhadap pelayanan perawatan kesehatan dan IPMG mendukung secara penuh program ini.
- Implementasi JKN akan juga memberikan dampak yang positif bagi perkembangan industri farmasi sehingga diharapkan akan tercipta pasar yang lebih luas untuk produk-produk baru yang semakin canggih dan inovatif dalam menjawab kebutuhan perawatan kesehatan yang semakin meningkat dan berkembang di Indonesia.
- Beberapa hal yang perlu diperhatikan secara bersama oleh para pemangku kepentingan sejak diberlakukan JKN juga menjadi perhatian dari IPMG yaitu:
 - Iuran yang ditetapkan untuk JKN kiranya masih kurang dapat memenuhi kebutuhan akan layanan perawatan kesehatan berkualitas yang dibutuhkan. Implikasi dari hal ini dapat berakibat pada menurunnya kualitas pelayanan perawatan kesehatan yang diberikan oleh para tenaga penyedia jasa kesehatan yang berusaha untuk menyesuaikan dengan sistem pembiayaan. Perawatan yang tidak maksimal bagi pasien dapat berakibat pada kurang efektif dan efisiennya suatu pelayanan perawatan kesehatan yang diberikan dan dapat berakibat menjadi beban tambahan bagi pemerintah dan juga sistem JKN. Akses terhadap obat-obatan dan protokol perawatan modern atau yang terkini merupakan juga hak bagi pasien JKN. Sehingga hak pasien untuk mendapatkan perawatan kesehatan sesuai dengan kebutuhan individual profil pasien yang didiagnosis oleh tenaga kesehatan harus tetap dihormati dan dilindungi. Oleh karenanya dalam sistem JKN, selayaknya tersedia fleksibilitas bagi penyedia jasa kesehatan untuk merawat pasien berdasarkan medical scientific based yang terbaik.
- Dari para pemegang kepentingan di sektor kesehatan, termasuk Kementerian Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), serta berbagai asosiasi terkait perawatan kesehatan, IPMG mengumpulkan beberapa opini berikut mengenai implementasi JKN selama semester pertama:
 - Terdapat sosialisasi program yang belum berjalan maksimal selama semester pertama yang berakibat pada kurangnya pemahaman di kalangan para pelaku, baik dalam hal implementasi maupun manfaat program.
 - Sebagai akibatnya terjadi kekacauan dalam penyediaan obat-obatan, keterbatasan dalam partisipasi rumah sakit dalam BPJS dan kurangnya pemahaman mengenai sistem BPJS di kalangan dokter, rumah sakit dan industri.
 - Kurangnya sosialisasi mengenai manfaat kepada masyarakat dan pemegang kepentingan terkait mengakibatkan kurangnya pemahaman mengenai manfaat JKN ini.
 - Salah satu hal yang sangat perlu diperhatikan adalah keberlanjutan dari segi pembiayaan program tersebut. JKN merupakan asuransi sosial yang menjamin pencakupan semua jenis penyakit. JKN dapat sangat membebani anggaran pemerintah dan apabila hal ini tidak dikelola dengan baik, maka JKN dapat membahayakan keberlangsungan program yang mulia ini.

- Dalam hal infrastruktur, terdapat distribusi yang tidak merata baik praktisi maupun fasilitas kesehatan, seperti keberadaan praktisi penyedia layanan kesehatan, rumah sakit dan klinik di seluruh Indonesia.

Rekomendasi IPMG:

- Pemerintah perlu menjamin kelanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional. Anggaran kesehatan saat ini yang masih sebesar 3 persen dan tidak hanya diperuntukan bagi pelaksanaan JKN saja, sudah saatnya bagi pemerintah untuk meningkatkan anggaran kesehatan sekurang-kurangnya 5 persen sebagaimana mandat yang diberikan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menjamin kesinambungan program, memberikan pelayanan memadai dan juga memperluas cakupannya.
- Peningkatan anggaran akan turut meningkatkan kualitas perawatan dan memastikan akses pasien terhadap obat-obatan baik generik maupun inovatif sesuai dengan kebutuhannya.
- Perlunya melakukan sosialisasi yang tidak hanya kepada masyarakat, namun juga kepada tenaga penyedia layanan kesehatan terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau.
- Perlunya peninjauan ulang tarif kapitasi dan pembiayaan.
- Perlunya peningkatan kerja sama sektor publik – swasta (*Public Private Partnership*) serta diberikannya kesempatan dan perlakuan yang sama bagi perusahaan multi nasional dan lokal untuk dapat berperan serta dalam program JKN guna menjamin tersedianya obat yang berkualitas yang dibutuhkan masyarakat dalam jumlah yang cukup.
- Pemerintah perlu mempertimbangkan konsep *co-payment/cost sharing* yang dapat meringankan beban finansial negara.
- Pemerintah hendaknya menyiapkan rencana jangka menengah (5 tahun) dalam upaya mengurangi kesenjangan tersedianya praktisi kesehatan dan infrastruktur fasilitas kesehatan sehingga merata di seluruh negeri.

OBAT-OBATAN PALSU

- Obat-obatan palsu dan tidak terdaftar banyak ditemukan dengan mudah di pasar Indonesia, dan menimbulkan ancaman kesehatan bagi masyarakat.
- Obat-obatan tersebut juga merupakan penyebab dari morbiditas yang tidak perlu, mortalitas dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap industri farmasi dan praktisi kesehatan yang juga dapat berdampak pada implementasi JKN.
- IPMG dan anggota-anggotanya berusaha untuk melawan dan mengurangi obat-obatan palsu dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya obat-obatan palsu.

Apa yang kami butuhkan:

- Kemauan politik dan usaha pemerintah untuk memberantas peredaran obat-obatan palsu dan ilegal yang dilakukan secara terstruktur dan terintegrasi.
- Koordinasi yang lebih baik antara para penegak hukum dalam memberantas obat palsu dan ilegal.

- Pemberian kewenangan khusus kepada para penegak hukum termasuk PPNS dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk penanggulangan dan pemberantasan obat palsu.
- Sosialisasi tentang tata cara penanggulangan dan pemberantasan obat palsu kepada jajaran penegak hukum dan juga kepada jajaran yudikatif untuk dapat menerapkan hukuman yang maksimal bagi para pelaku pemalsuan .

IPMG siap berkolaborasi dengan badan-badan pemerintahan, seperti Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), serta instansi terkait lainnya untuk membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya obat palsu.

ETIKA BERBISNIS

- Kami berpendapat bahwa praktik pemasaran yang tidak etis dapat berdampak pada biaya operasional yang lebih tinggi bagi perusahaan. Oleh sebab itu, kami yakin bahwa standar etika berbisnis yang sama harus dijalankan oleh semua perusahaan farmasi yang beroperasi di Indonesia.
- Penerbitan Peraturan Menteri Kesehatan No.14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi pada bulan Maret 2014 merupakan inisiatif pemerintah untuk mewujudkan iklim bisnis yang etis.
- Sebagai tindak lanjut dari inisiatif tersebut, maka Kementerian Kesehatan bersama dengan para pelaku dalam sektor kesehatan dan KPK menandatangani komitmen bersama tentang Pengendalian Gratifikasi pada Bulan April 2014.
- IPMG telah menerapkan pengendalian etika berbisnis yang tegas selama 10 tahun terakhir dengan menggunakan Kode Etik Pemasaran sebagai panduan bagi anggota-anggotanya untuk berinteraksi dengan semua pemegang kepentingan di sektor pelayanan kesehatan. Kode Etik Pemasaran ini secara berkala disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang berlaku lainnya.
- Menciptakan iklim bisnis yang etis merupakan tanggung jawab bersama bagi: pemerintah, LSM-LSM, masyarakat sipil dan sektor swasta.

Rekomendasi IPMG:

- Dorongan dari pemerintah dalam menciptakan tata perilaku bisnis yang etis bagi semua perusahaan yang beroperasi dalam sektor pelayanan kesehatan di Indonesia.
- Mencegah dan mengambil tindakan yang lebih tegas melawan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam sektor pelayanan kesehatan.

Anggota IPMG:

USA: Abbott, Eli Lilly, Janssen, Merck Sharp and Dohme, Pfizer, **Switzerland:** Novartis, Roche, **Germany:** Boehringer-Ingelheim, Merck, Bayer, **Japan:** Astellas, Eisai, Meiji, Otsuka, Takeda, Tanabe, Taisho **France:** Sanofi Group, Servier, **Singapore:** Transfarma Medica Indah, **United Kingdom:** AstraZeneca, GlaxoSmithKline, **Denmark:** Novo Nordisk.



IPMG

International Pharmaceutical Manufacturers Group

Kontak:

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Parulian Simanjuntak

Direktur Eksekutif

Pondok Indah Office Tower I, Lantai 1, Suite 102,

Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA

Jakarta Selatan 12310 - Indonesia

Telp/Fax: +6221-769 7533 / +6221-769 7532

E-mail: parsi@indo.net.id

Situs: <http://www.ipmg-online.com>